

PENERAPAN SELF ASSESMENT SYSTEM PERFORMA PELATIHAN E-SPT & DJPONLINE PPH PASAL 21 PERSPEKTIF NET BASIC (STUDY KASUS YAYASAN PENDIDIKAN AULADY TAHUN 2022

Sanusi^{a,1}, Nanda Agustina^{b,2}, Marbella Sanira^{c,3}, Merdeka Kusuma Bangsa^{d,4}

^aSanusi; Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, universitas Pamulang*

^bNanda Agustina; Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, universitas Pamulang

^cMarbella Sanira; Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, universitas Pamulang

^dMerdeka Kusuma Bangsa; Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, universitas Pamulang

¹sanusibravo@gmail.com; ²nandaagustin004@gmail.com; ³marbellasanira@gmail.com;

⁴merdekareka@gmail.com

*sanusibravo@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan PKM berupa sosialisasi dan pelatihan serta pelayanan perhitungan, penyeteroran, pelaporan Manual Form SPT 1721, Perhitungan Exel PPh 21, Penyeteroran dengan E-Billing, Pelaporan melalui system E-Filling dan DJPonline oleh para relawan pajak terkhusus yaitu siswa dan siswi kelas 12 akuntansi SMKN 1 Kota Tangerang Selatan dengan supervisi oleh tim PKM. Latar belakang antara lain kurangnya pemahaman para siswa dan siswi mengenai aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, karena peraturan perpajakan di Indonesia dinamika terus terjadi sehingga menuntut para siswa dan siswi mengikuti perubahan. Masalah mitra dalam PKM Pelayanan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan sekolah dan sebagai partisipasi mitra dalam pelaksanaan PKM ini dengan menyediakan informasi dan video tutorial serta tempat dan peralatan yang memadai di SMKN 1 Kota Tangerang Selatan terutama hal terkait belum dinstalnya aplikasi E-SPT sebelumnya dan sebagian Laptop dan PC ada yang tidak berfungsi. Tujuan pengabdian yaitu memberikan pemahaman mengenai perhitungan, penyeteroran, dan Pelaporan PPh 21 dengan perspektif net basic; Metode analisis yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah metode *deskriptif-comparative*, yaitu dengan menganalisis dan mengolah data-data laporan daftar gaji Yayasan Aulady dan laporan fiskal yang ada, mengidentifikasi jenis objek PPh 21 dan membuat kertas kerja untuk memudahkan perhitungan, baik ceramah, tutorial, diskusi; Pelatihan seputar penghitungan PPh 21 dengan berbagai contoh objek PPh 21, Tanya jawab seputar implementasi *self assessment system* untuk PPh 21, Diskusi mengenai masalah yang dihadapi oleh peserta pelatihan dan solusi yang dapat diberikan; Kesimpulan yang diperoleh Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) memberikan kesempatan bagi siswa dan siswi untuk mempraktikkan dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh, Kegiatan (PKM) menambah pengalaman dan wawasan dalam praktik perhitungan PPh 21, kegiatan PKM meningkatkan kompetensi yang dimiliki; dan saran-saran antara lain sebelum melakukan penerjunan siswa dan siswi ke lokasi PKM, sebaiknya diberi pembekalan yang memang memadai agar saat berada di lokasi dalam keadaan benar-benar siap, Program PKM yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa yang sekiranya bermanfaat sebaiknya ditindak lanjuti oleh

pihak sekolah, Sekolah diharapkan dapat meningkatkan lagi hubungan yang baik dengan pihak universitas maupun pihak mahasiswa PKM.

Kata Kunci: Self Assesment; PPh pasal 21; Net Basic

1 kali enter

Abstract

The implementation of PKM in the form of socialization and training as well as calculation services, deposits, reporting of Manual Form SPT 1721, Calculation of Exel PPh 21, Deposit with E-Billing, Reporting through the E-Filling system and DJPonline by volunteers p invite especially students and students of grade 12 accounting SMKN 1 South Tangerang City with supervision by the PKM team; background among other things, the lack of understanding of students and students regarding the tax rules that apply in Indonesia, because tax regulations in Indonesia dynamics continue to occur so that it requires students and students to follow the changes; 2) partner issues in PKM This service is carried out based on the needs of the school and as participation of partners in the implementation of this PKM by providing information and video tutorials as well as adequate places and equipment at v SMKN 1 South Tangerang City, especially related matters related to the previous E-SPT application and some laptops and PCs are not working; Thepurpose of devotion is to provide an understanding of the calculation, deposit, and Reporting of PPH 21 with perspective net basic; The analysis method that will be used in this activity is the *descriptive-comparative* method, namely by analyzing and processing data on the Aulady Foundation's payroll report and existing fiscal reports, identifying the types of PPh 21 objects and making working papers to facilitate calculations, both lectures, tutorials, discussions; Training on calculating PPh 21 with various examples of PPh 21 objects, Questions and answers about the implementation of a *self-assessment system* for PPh 21, Discussion about the problems faced by trainees and solutions that can be provided; Theconclusions obtained by Community Service (PKM) provide opportunities for students and students to practice and implement the knowledge gained, Activities (PKM) add experience and insight in the practice of calculating PPh 21, PKM activities increase their competencies; and suggestions include s Before deploying students and students to the PKM location, it should be given adequate debriefing so that when they are in the location in a completely ready state, the PKM Program that has been implemented by students who are useful should be followed up by the school, the school is expected to improve good relations with the university and PKM students .

Keywords: Self Assessment; Income tax article 21; Net Basic

PENDAHULUAN

latar belakang antara lain kurangnya pemahaman para siswa dan siswi mengenai aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia,

karena peraturan perpajakan di Indonesia dinamika terus terjadi sehingga menuntut para siswa dan siswi mengikuti perubahan; masalah mitra dalam PKM Pelayanan ini

dilakukan berdasarkan kebutuhan sekolah dan sebagai partisipasi mitra dalam pelaksanaan PKM ini dengan menyediakan informasi dan video tutorial serta tempat dan peralatan yang memadai di SMKN 1 Kota Tangerang Selatan terutama hal terkait belum dinstalnya aplikasi E-SPT sebelumnya dan sebagian Laptop dan PC ada yang tidak berfungsi; Penerimaan negara sebesar Rp 1.865,7 triliun atau dengan kata lain 82,596 penerimaan APBN berasal dari industri perpajakan, salah satu objeknya adalah pajak penghasilan (Baradja et al., 2020). Reni Setyoningtyas (2013) penerapan pajak penghasilan PPh pasal 21, serta membahas bagaimana cara pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 namun data yang diteliti dan kebijakan/peraturan yang dipakai masih menggunakan peraturan lama belum sesuai dengan kebijakan yang berlaku saat itu. Dasar utama untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, agar wajib pajak orang pnbadi tidak ditagih berlebihan (Fitri & Anthoni, 2021). Fitri Aprilyanti (2013) Analisis perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21, serta menggunakan perencanaan pajak terhadap beban pajak terutang untuk mengharapkan dapat meminimalkan penghematan pajak yang ditanggung perusahaan; Tujuan pengabdian yaitu memberikan pemahaman mengenai perhitungan, penyeteroran, dan Pelaporan PPH

21 dengan perspektif net basic. Manfaat pengabdian yaitu dapat mengajarkan kembali teori-teori, terutama mengenai PPh 21, yang telah didapatkan selama kuliah Kepada SMKN 1 Kota Tangerang Selatan Juga sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta menyempurnakannya. Solusi yang dipilih, Membantu menghitung kewajiban pajak untuk wajib pajak melalui aplikasi Sprendsheed dengan hasil akhir mengetahui PPh terutang pajak Yayasan Aulady mungkin masih terutang pajak PPh pasal 21 periode Oktober 2022, membantu pengisian E-SPT dan pelaporan melalui E-filling yang telah disediakan oleh DJP melalui webside DJPONLINE setelah pihak Yayasan Aulady melakukan penyeteroran uang tunai ke kas negara melalui E-Billing.

METODE PELAKSANAAN

Metode pada artikel hasil pengabdian masyarakat menguraikan; Pelatihan ini telah dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2022 mulai pukul 07.30 s.d 15.00 WIB di Gd. Aula dan Lab 1 dan 2 SMKN 1 Kota Tangerang Selatan Jl. Waru nomor 59 Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten dengan peserta sebanyak 75 orang yaitu para siswa/siswi SMKN 1 Kota Tangerang Selatan kelas 12 (1) dan (2). Pelaksanaan kegiatan ini juga dibantu oleh mahasiswa. Mahasiswa yang terlibat yaitu

mahasiswa aktif Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang sebanyak 4 (empat) orang. Pajak penghasilan badan tergolong pajak subjektif, yaitu pajak yang mempertimbangkan keadaan setiap wajib pajak sebagai faktor kunci dalam menentukan pemungutan pajak, sehingga setiap wajib pajak memiliki tagihan pajak yang berbeda-beda (Lativa et al., 2020). Target atau subjek pengabdian Perusahaan subsektor Pendidikan SMKN 1 Kota Tangerang Selatan sebagai Subjek melakukan Pelatihan dan Sosialisasi Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh pasal 21 dengan metode net Basis yang telah dipotong oleh Lembaga (instansi) untuk dijadikan sasaran dengan melibatkan siswa/siswi kelas 12 sebanyak 2 kelas masing-masing sebanyak 75 sampel. Menurut Sugiyono, (2013) tujuan menggunakan purposive sampling ialah untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan penulis. Metode pengabdian yaitu Pelaksanaan PKM berupa sosialisasi dan pelatihan serta pelayanan perhitungan, penyetoran, pelaporan Manual Form SPT 1721, Perhitungan Exel PPh 21, Penyetoran dengan E-Billing, Pelaporan melalui system E-Filling dan DJPonline oleh para relawan Pajak siswa dan siswi dengan supervisi oleh tim PKM. Metode analisis yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah metode

deskriptif-comparative, yaitu dengan menganalisis dan mengolah data-data laporan daftar gaji Yayasan Aulady dan laporan fiskal yang ada terhadap hasil perhitungan dari perusahaan yang optimal berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Laporan Pertanggung Jawaban kepada LPPM dibuat setelah PKM selesai dilaksanakan dan pada saat acara Diseminasi Pengabdian Masyarakat (DPM) pada 13 Januari tahun 2023 dan akan dipublikasikan dalam bentuk prosiding dedikasi. Prosedur instrumen yaitu terkait populasi yang digunakan dalam permasalahan ini adalah perusahaan subsektor Pendidikan SMK (Yayasan Aulady) selama kurun waktu 1 (satu) hari bulan Oktober 2022 yang berjumlah 75 siswa/siswi SMKN 1 Tangerang Selatan. Alasan penyusun melakukan PKM subsektor pendidikan, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia, volume kebutuhan terhadap pelaporan pajak pun terus meningkat pula. Kecenderungan masyarakat Indonesia untuk menikmati pelayanan yang telah disajikan oleh otoritas DJP ini menyebabkan banyak bermunculan perusahaan-perusahaan baru di bidang jasa konsultasi pajak mereka menganggap sektor industri jasa pelatihan dan konsultasi pajak memiliki prospek yang menguntungkan baik masa sekarang maupun yang akan. Penulis menentukan sampel size sebanyak 75

sampel., dan sebagainya. Adapun kriteria pemilihan sampel pada penulisan ini adalah Perusahaan subsektor pendidikan Yayasan Aulady sebagai objek perhitungan PPh pasal 21 periode Oktober 2022. Perusahaan subsektor Pendidikan SMKN 1 Kota Tangerang Selatan sebagai Subjek melakukan Pelatihan dan Sosialisasi Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh pasal 21 dengan metode net Basis yang telah dipotong oleh Lembaga (instansi) untuk dijadikan sasaran dengan melibatkan siswa/siswi kelas 12 sebanyak 2 kelas. Teknik pengumpulan data *Library Research* adalah penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan landasan yang kuat, baik berupa rumus-rumus teknis perhitungan maupun teori-teori yang mendukung obyek penelitian. Sumber-sumber riset kepustakaan yang dilakukan yakni berupa buku-buku, jurnal-jurnal hasil penelitian para akademisi, internet serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek permasalahan. Riset Lapangan (*Field Research*) Penulisan tugas akhir ini menggunakan data sekunder subsektor pendidikan yang diperoleh dari data gaji bulan Oktober 2022 yayasan Aulady melalui laporan bulanan gaji pegawai tetap perusahaan yang menjadi populasi dan sampel. Data yang diperlukan dalam penyusunan ini adalah laporan daftar gaji yang telah lakukan pembayaran oleh divisi

finance perusahaan. Alat analisis data yaitu Microsoft excel, E-SPT, E-Billing, E-Filling, Djponline.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Program PPh secara Manual bahwa materi mengenai PPh 21 disampaikan oleh tim PKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan akuntansi Universitas Pamulang. Materi yang disampaikan meliputi objek PPh 21, pemotong PPh 21, penerima penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21, penghasilan yang dikenakan PPh 21, Tarif yang berlaku untuk perhitungan PPh 21 dan juga tata cara perhitungan PPh Pasal 21. Adapun langkah yang dilakukan dalam pelatihan pembuatan kertas kerja ini adalah sebagai berikut: Mengidentifikasi pegawai tetap dan selain pegawai tetap. Mengidentifikasi status masing-masing pegawai apakah TK (Tidak Kawin), K/0 (Kawin dengan tidak ada tanggungan), K/1 (Kawin dengan tanggungan 1 orang), K/2 (Kawin dengan tanggungan 2 orang) dan K/3 (Kawin dengan tanggungan 3 orang).

Tabel 1. Perhitungan PPh pasal 21 Manual

No.	Nama Pegawai	NPWP	Status	Gaji	By Jabatan	PgHTh	PTKP	KPK	PPH Terutang
1	R. A Linda Chendra Dewi (TK)	79.834.835.5411.000	TK/0	11.609.000	500.000	133.308.000	54.000.000	79.308.000	574.683
2	R. A Riani Anom Paramita (TK)	79.834.836.3477.000	TK/0	11.576.000	500.000	132.912.000	54.000.000	78.912.000	569.733
10	Anna Mariana (TK)	09.315.998.6411.000	TK/0	9.571.000	478.550	109.109.400	54.000.000	55.109.000	272.196
17	Abdillah Wuryantoro (SD)	28.123.383.3411.000	K/1	10.990.000	500.000	125.880.000	63.000.000	62.880.000	369.333
18	Muhammad Ilcham (SD)	89.339.413.0413.000	K/3	7.873.750	393.688	89.760.750	72.000.000	17.760.000	74.000
59	Indriangsih (SMPSMA)	54.305.902.8412.000	TK/0	6.750.000	337.500	76.950.000	54.000.000	22.950.000	95.625
61	Fitra Ambarwati (SMPSMA)	71.391.260.8411.000	TK/0	4.972.500	248.625	56.686.500	54.000.000	2.686.000	11.192
									1.966.762

Sumber : Data Diolah

Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat PPh terutang sebesar Rp. 1.996.762 nilai tersebut adalah Pajak penghasilan atas pegawai tetap yang perolehan gajinya diatas ketentuan PTKP dengan batas standar Rp. 4.500.000 selama satu bulan atau Rp. 54.000.000,- setahun. Setelah mendapatkan hasil PPh terutang maka perusahaan akan melakukan pembayaran melalui Internet Banking, Mobil Banking dan setor tunai serta banyak lainnya untuk melakukan pembayaran kewajiban terhadap PPh pasal 21 dengan terlebih dahulu mencetak ID Billing sebagai nomor yang valid untuk diserahkan ke Bank dan akan diberikan bukti bahwa setelah melakukan penyetoran pajak bagi instansi atau Lembaga akan mengetahui NTPN. Dengan divalidasinya nomor NTPN tersebut bisa digunakan untuk melakukan pelaporan dengan cara menarik data CSV dari aplikasi E-SPT untuk dilaporkan masa Oktober 2022.

Gambar 1 Praktik tutorial pengisian form manual vSPT 1721



Sumber : Data Diolah

Gambar 1 team tutorial PKM melakukan pendampingan dan bimbingan pelatihan bagaimana cara mengisi form 1721 secara manual. Peserta sedang antusias mengikuti petunjuk dan arahan team tutorial. Langkah – langkahnya memulai dari perhitungan secara manual melalui excel ataupun media kalkulator (kurang efektif), jika ternyata sudah diolah dalam perhitungan excel tampak terlihat hasil akhirnya berupa PPh terutang. Dan selanjutnya sortir data pegawai mana saja yang mendapatkan PTKP maka diisi di form 1721 Lampiran 1 seperti contoh di bawah ini. Gambar 2 Hasil perhitungan excel telah di ekspor E-SPT

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEWAKILAN NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGERI DAN PENSUNANNYA										
KEMENTERIAN KEKANGINAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		MASA PAJAK : Bulan ke-13 - 2022	NO. SURAT PAJAK : NPPW PEMOTONG : 02 287 811 0	NO. SURAT PAJAK : NPPW PEMOTONG : 02 287 811 0	NO. SURAT PAJAK : NPPW PEMOTONG : 02 287 811 0	NO. SURAT PAJAK : NPPW PEMOTONG : 02 287 811 0	NO. SURAT PAJAK : NPPW PEMOTONG : 02 287 811 0	NO. SURAT PAJAK : NPPW PEMOTONG : 02 287 811 0	NO. SURAT PAJAK : NPPW PEMOTONG : 02 287 811 0	NO. SURAT PAJAK : NPPW PEMOTONG : 02 287 811 0
NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEKERJAAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BERSI (Rp)	PPH DIPOTONG (Rp)	KURANG DIBAYAR		
			NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)				IS	ISB	
1	79.834.835-411.000	R. A. Linda Chandra Dewi (TK)			21-100-01	11.809.000	574.883			
2	79.834.836-411.000	R. A. Rizki Anon Paramita (TK)			21-100-01	11.576.000	569.733			
3	08.315.988-411.000	Anna Mariana (TK)			21-100-01	9.571.000	272.196			
4	28.123.983-411.000	Abdullah Wuryantoro (SC)			21-100-01	10.966.000	389.333			
5	88.339.413-013.000	Mochamad Irfan (SC)			21-100-01	7.873.750	74.000			
6	56.305.832-412.000	Hendanggi (SMP/SMK)			21-100-01	8.750.000	86.825			
7	71.391.263-411.000	Filza Anbarani (SMP/SMK)			21-100-01	4.872.500	11.182			
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
JUMLAH A						63.342.250	1.966.762			
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEWAKILAN NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGERI DAN PENSUNANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELERUSI PPhP						56 ORANG	150.832.250			
C. TOTAL (JUMLAH A + B)						213.874.500	1.966.762			

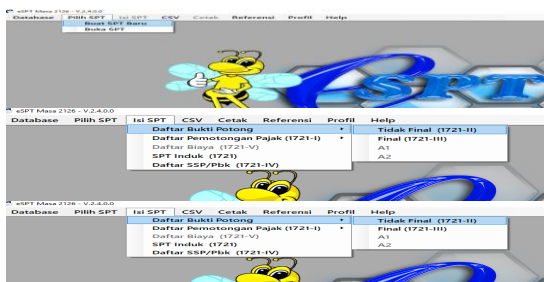
Sumber : Data Diolah

Gambar 2 menunjukkan bahwa ada 7 (tujuh) pegawai tetap yang terdaftar sebagai orang yang penghasilan selama sebulan dipotong oleh perusahaan karena menganut net basis. Karena semua pegawai yang terdaftar pada bukti potong memiliki NPWP semua tidak ada sanksi kenaikan 20 % dari PPh terutang.

Berdasarkan UU No 36 Tahun 2008 dan Peraturan Dirjen Pajak No PER-16/PJ/2016, wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif pajak lebih besar 20% dari wajib pajak yang memiliki NPWP. Daftar Pemotongan Pajak (1721-I), digunakan untuk pelaporan atas pemotongan PPh 21/26 pegawai tetap baik dalam Masa Pajak atau Tahun Pajak. Untuk pegawai tetap yang memiliki penghasilan di bawah PTKP juga dapat dimasukkan ke dalam Satu Masa Pajak atau Satu Tahun Pajak, sehingga sub menu ini mengakomodir jumlah penghasilan bruto pegawai yang di bawah PTKP. Selain itu, untuk Tahun Pajak hanya dapat dibuka pada masa pajak terakhir, yang umumnya ialah Masa Pajak Desember.

Program PPh secara E-SPT, buka Aplikasi e-SPT PPh 21/26 kemudian login database perusahaan Anda. Seperti biasa login menggunakan *username*: administrator dan *Password*: 123. Klik “Pilih SPT” lalu “Buat SPT Baru”, selanjutnya pilih bulan dan tahun SPT Masa PPh 21/26 yang akan dibuat. SPT berhasil dibuat kemudian klik “oke”

Gambar 3 Langkah-langkah Pengisian E-SPT



Gambar 3 Pilih “Isi SPT” kemudian input SPT berdasarkan data pegawai. SPT Masa PPh 21/26 yang diinput mulai dari daftar bukti potong tidak final dan final jika ada. Kemudian klik “Daftar Pemotongan Pajak (1721-I)”, pilih “Satu Masa Pajak”, input berdasarkan data pegawai tetap yang telah di siapkan dengan klik “tambah”. Namun apabila pegawai pada perusahaan sangat banyak, maka dapat menggunakan cara cepat dengan klik “CSV”. Kemudian klik “ekspor”, “Bukti Potong dan SSP”, selanjutnya pilih file yang akan diekspor yaitu “Pemotongan Pajak Bulanan” untuk input daftar pegawai tetap pada e-SPT dan “Bukti Potong Tidak Final” untuk input daftar pegawai tidak tetap jika ada. Kemudian input data pembayaran pajak yang terutang dengan klik “Isi SPT”, pilih “Daftar SSP/Pbk (1721-IV) kemudian “tambah” dan input data sesuai dokumen yang telah disiapkan. Selanjutnya klik “Isi SPT” pilih “SPT Induk”. Sesuaikan keterangan yang diminta pada SPT Induk “simpan”. SPT PPh 21/26 sudah selesai diinput, langkah terakhir yaitu lapor SPT Masa PPh 21/26.

Program Pelaporan DJPOnline, Akses aplikasi OnlinePajak, Masuk ke fitur e-Filing, Ikuti langkah yang tersedia, lengkapi dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan, Klik lapor, Unduh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

Gambar 4 langkah-langkah lapor Djponline



Kewajiban lapor pajak online ini berlaku sejak **1 April 2018**. Aplikasi e-Filing apa saja yang merupakan saluran resmi yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak; Website penyalur SPT elektronik seperti aplikasi e-Filing Online Pajak, ditetapkan melalui pasal 2a PMK Nomor 9/PMK.03/2018 tentang SPT. Agar dapat melakukan e-Filing, berikut ini syarat yang harus dimiliki: EFIN/nomor identitas elektronik, EFIN dibutuhkan agar wajib pajak bisa melakukan transaksi pajak secara online. Cara mendapatkan EFIN yaitu Unduh formulir permohonan aktivasi EFIN, Ajukan langsung formulir EFIN ke KPP tanpa diwakilkan sambil melampirkan syarat berupa asli dan foto kopi dokumen di bawah ini: Asli dan foto kopi KTP (WNI), Paspor dan KITAS/KITAP (WNA), NPWP/Surat Keterangan Terdaftar, Email aktif.

Solusi berdasarkan temuan awal di atas, maka beberapa anggota pelaksana PKM FEB Universitas Pamulang bersama 75 (tujuh puluh lima) peserta siswa/siswi SMKN Kota Tangerang Selatan yang sudah dilatih serta mendapat dukungan dari Pimpinan Universitas Pamulang serta dari Kepala

Sekolah SMKN 1 Kota Tangerang Selatan dengan lokasi di Jl. Waru nomor 59 kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten berinisiatif untuk : 1. Membantu menghitung kewajiban pajak untuk wajib pajak melalui aplikasi Spreadsheed dengan hasil akhir mengetahui PPh terutang. 2 Membantu pengisian E-SPT dan pelaporan melalui E-filing yang telah disediakan oleh DJP melalui webside DJPONLINE.

Keunggulan Wajib Pajak dapat menggunakan seluruh fitur pada aplikasi Online Pajak secara gratis, pengguna dapat menuntaskan kewajiban perpajakannya di mana saja dan kapan saja, Wajib Pajak bisa melakukan hitung otomatis dan bayar pajak online melalui aplikasi ini, Wajib pajak dapat melaporkan dan membayar seluruh jenis pajak asal jenis pajak tersebut memiliki *file* CSV, Lantaran Online Pajak merupakan aplikasi online berbasis web, pengguna tidak perlu *update* dan menginstalasi ketika terdapat pembaruan, Bukti lapor tidak akan hilang dan mudah ditemukan karena BPE/NTTE tersimpan dalam jangka waktu lama dalam basis data web. Keterbatasan Pengabdian kurangnya pemahaman para siswa dan siswi mengenai aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, karena peraturan perpajakan di Indonesia dinamika terus terjadi sehingga menuntut para siswa dan

siswi mengikuti perubahan. Tri Dharma di bawah pendidikan tinggi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar kampus dan menjalin kemitraan yang baik antara institusi dan masyarakat (Maulana & Hidayatulloh, 2021). Masalah mitra dalam PKM Pelayanan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan sekolah dan sebagai partisipasi mitra dalam pelaksanaan PKM ini dengan menyediakan informasi dan video tutorial serta tempat dan peralatan yang memadai di SMKN 1 Kota Tangerang Selatan terutama hal terkait belum dinstalnya aplikasi E-SPT sebelumnya dan sebagian Laptop dan PC ada yang tidak berfungsi.

KESIMPULAN

Kesimpulan terdiri atas; 1. Memberikan kesempatan bagi siswa dan siswi untuk mempraktikkan dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh. 2. Kegiatan (PKM) menambah pengalaman dan wawasan dalam praktik perhitungan PPh 21. 3. Kegiatan PKM meningkatkan kompetensi yang dimiliki

Saran sebelum melakukan penerjunan siswa dan siswi ke lokasi PKM, sebaiknya diberi pembekalan yang memadai agar saat berada di lokasi dalam keadaan benar-benar siap, Program PKM yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa yang sekiranya bermanfaat sebaiknya ditindak lanjuti oleh pihak sekolah, Sekolah diharapkan dapat

meningkatkan lagi hubungan yang baik dengan pihak universitas maupun pihak mahasiswa PKM.

Rekomendasi dari penulisan tugas akhir ini ; tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan para Peserta Pelatihan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan PPh 21. Untuk itu, jika ada pelatihan selanjutnya para peserta dapat menyiapkan laptop dan mengunduh aplikasi E-SPT untuk praktek secara langsung pengisian SPT. Selain itu, karena latar belakang Peserta cukup beragam, maka hendaknya dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok kecil untuk membahas materi dan mendiskusikan permasalahan yang menjadi kesulitan para peserta serta memecahkan masalah tersebut bersama-sama dengan pemberi materi. Sehingga diharapkan pelatihan tersebut membawa manfaat lebih dan membantu para peserta di dalam mengaplikasikannya ke kegiatan usaha yang mereka lakukan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa persiapan sampai pada penyusunan artikel ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan artikel ini. Oleh karena itu, saya menyampaikan terimakasih kepada orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan

bantuan dukungan material dan moral, yulianto S.E., M.M. selaku dosen pembimbing Universitas Pamulang yang telah banyak memberikan saran dan masukan dalam penyusunan artikel ini, Ibu Juitania, M.Pd, dosen akuntansi fakultas ekonomi universitas Pamulang, dan kepala sekolah SMKN 1 Kota Tangerang Selatan Bpk Marta Nurdin S.,S.T.,M.Pd Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga artikel ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.



(Gambar 1. Foto bersama tim PKM dengan dosen pendamping PKM di ruang aula saat persiapan pembukaa ketua pelaksanaan PKM).



(Gambar 2. Saat ketua pelaksana PKM melakukan sambutan pembuka pelatihan PPh pasal 21 di ruang Aula)



(Gambar 3. Foto saat Tim PKM sedang menjelaskan materi SPT pasal 21).



(Gambar 4. Foto pada saat perpisahaan tim PKM dengan kepala sekolah SMKN 1 Tangerang Selatan saat mengucapkan terimakasih)

REFERENSI

Aprilyyanti Fitri. (2013). Analisis perhitungan PPh pasal 21 dan penerapan perencanaan pajak terhadap beban pajak terutang pada PT. Cakrawala Sejati : Surabaya: Grafika. Universitas Wijaya Putra.

Baradja, L., Yuanita, Y., & Budi, A. G. W. (2020). Penerapan Self Assesment System Pph Pasal 21 Untuk Umkm Se Jakarta. *Jurnal Berdaya Mandiri*, 2(2), 408–418.<https://doi.org/10.31316/jbm.v2i2.749>

Fitri, E. N., & Anthoni, L. (2021). Implementasi : *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 2(2), 53–62.

Lativa, L., Sanjaya, R., Farida, S. I., Choir, F. Al, & Sunardi, D. (2020). Pelatihan Perhitungan Pajak PPh Pasal 21, Pasal 23, dan PPh Pasal 4 Ayat 2 Kepada Kepala Sekolah,

Bendahara, Administrasi SMP Kota Tangerang Selatan Gugus 02. *Dedikasi PKM*, 1(1), 80. <https://doi.org/10.32493/dedikasipkm.v1i1.6059>.

Maulana, M. N., & Hidayatulloh, A. (2021). Sosialisasi dan Pelatihan Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2021. 1st E-Proceeding SENRIABDI (Seminar Nasional Hasil Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat), 1(1), 887–893.

M, N. A., Mahpudin, E., & Paratika, T. L. (2022). Penyuluhan tentang PPH Pasal 21

Pada PT Omron Manufacturing of Indonesia. 6, 1–5.

Setyoningtyas Reni. (2013). Penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap pada CV. Platinum Mitra : Surabaya: Grafika. Universitas Wijaya Putra.

Sugiyono, (2013). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.